



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343

[dpmpstp.banyuwangikab.go.id](http://dpmpstp.banyuwangikab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Izin Praktik Okupasi Terapis

No. SK : 188/741/KEP/429.011/2022

## Persyaratan

1. KTP Pemohon yang masih berlaku
2. Ijazah Pendidikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis;
3. Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir;
4. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
5. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik pelayanan okupasi terapi;
6. Pas Foto berwarna terbaru;
7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
9. - Tambahan Persyaratan untuk Praktik Mandiri:
10. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
11. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara mandiri oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan berbantuan yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan bergerak dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
2. Izin Praktik Okupasi Terapis, akan terbit setelah melengkapi persyaratan serta dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen.

## Waktu Penyelesaian

35 Menit

## Biaya / Tarif



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343

[dpmpstsp.banyuwangikab.go.id](http://dpmpstsp.banyuwangikab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SIPOT (Surat Izin Praktik Okupasi Terapis)

### Pengaduan Layanan

Dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat